

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Simon Lamakadu meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk tidak asal melakukan pengasapan atau fogging untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD).

Menurut Simon, pengasapan yang bertujuan untuk memberantas jentik nyamuk aedes aegypti dapat membunuh binatang lainnya. "Fogging bisa membunuh hewan-hewan lain. Dan kadang biodiversitasnya jadi terganggu kalau asal fogging," ujar Simon dalam keterangannya Kamis (25/4). Dinkes DKI diminta melakukan uji epidemiologi saat ada laporan kasus DBD di suatu wilayah di Jakarta. Data kasus bisa diambil dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas yang terdapat kasus DBD.

"Uji epidemiologi dilakukan untuk melihat apakah di kawasan tersebut terdapat sarang nyamuk yang mengakibatkan DBD," ucap Simon.

Adapun kasus DBD di Jakarta meningkat

pesat dalam satu bulan terakhir. Ada 1.729 kasus DBD di Jakarta hingga 18 Maret 2024. Jumlah orang yang terjangkit itu naik 1.102 orang dari sebelumnya 627 kasus pada 19 Februari 2024.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, kasus DBD di DKI terbanyak di wilayah Jakarta Barat. Ada 526 kasus DBD terjadi pada anak-anak hingga dewasa. "Di wilayah Jakarta Barat ada 562 kasus, kemudian di Jakarta Selatan 450 kasus," ujar Ani.

Selain itu, terdapat 395 kasus DBD di Jakarta Timur dan 194 kasus di Jakarta Utara. Kemudian ada 115 kasus di Jakarta Pusat dan 13 kasus di Kepulauan Seribu. Meski begitu, Ani menegaskan bahwa peningkatan kasus DBD di Jakarta masih dapat terkendali. Kapasitas rumah sakit juga masih mumpuni untuk menangani warga yang terjangkit. "Sekarang masih oke, masih terkendali. Sampai sekarang masih kami monitor semua. Semua masih terkendali," jelas Ani. • yan

STOK DARAH BULAN INI MENIPIS

PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

JAKARTA (IM) - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat menyebut stok kantong darah pada April ini menipis. "Itu memang gejala tahunan yang selalu terjadi ya. Jadi pendonor berkurang gitu," kata Ketua PMI Jakarta Barat, Beky Mardani saat dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Beky menuturkan, jumlah kantong darah yang diterima April sebanyak 4.428 buah. Adapun bulan lalu, kantong darah yang diterima PMI Jakbar sekitar 9.019 buah.

Beky mengunda, intensitas donasi darah berkurang di April karena masyarakat berpuasa. "Wajar karena pas puasa badan lemas begitu kan. Itu peristiwa tahunan lah. Apalagi mau Lebaran, masyarakat sibuk mudik ya," tutur Beky.

Untuk memancing kembali para donor (penderma darah), Beky pun mengadakan bagi-bagi sembako untuk setiap donor pada 8 sampai 15 April 2024. Menurut dia, ide ini berhasil dalam memantik semangat para donor untuk memberikan darahnya.

"Total 320 paket habis terserap. Stimulus ini ber-

hasil, tiap hari 40 paket sembako habis. "Apalagi, saat warga sebagian besar sudah mudik," ucap Beky.

Walaupun paket sembako sudah habis, PMI Jakbar tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mendonasi darahnya. Terlebih, virus demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah penting di Jakarta Barat bulan April ini.

"Permintaan DBD ini kan (untuk) trombosit ya. Sekarang jadi naik, harus diimbangi juga," terang Beky.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.124 orang dirawat karena kasus DBD di Jakarta Barat, pada Bulan April 2024. "Per 17 April 2024 total pasien DBD sebanyak 1.124 kasus," kata Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari.

Erizon menambahkan, rentang usia yang terjangkit DBD meliputi 14 tahun hingga 44 tahun. Kata dia, terdapat tiga kecamatan yang terdapat banyak penderita DBD. "Ada tiga kecamatan terbanyak yakni Cengkareng, Kalideres, dan Kembangan," jelas Erizon. • yan

Alokasi 5% APBD untuk Kelurahan di Jakarta tidak Tepat

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menilai usulan DPR RI terkait anggaran untuk dana kelurahan sebesar minimal 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak tepat. Menurut dia, aturan di dalam Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tersebut, mirip dengan kebijakan dana desa yang berlaku di daerah lain.

"Ini kan kayak duplikasi dari daerah-daerah lain di luar Jakarta seperti dana desa. Padahal Jakarta itu kalau saya lihat tidak seperti daerah lain," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Pras mengatakan permasalahan yang dihadapi setiap kelurahan di Jakarta berbeda-beda. Dengan begitu, anggaran belum menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan tugas setiap kelurahan. Dirinya juga mempertanyakan alasan DPR RI dan pemerintah menyepakati aturan itu, karena menganggap banyak kelurahan belum bekerja secara optimal.

"Sekarang apa kepentingannya di setiap wilayah? Misalnya kelurahan menteng, keperluan

apa? Kalau tidak banyak keperluan karena warganya kaya semua, buat apa? Uangnyanya mau diapakan?" kata Prasetyo.

Ia mengatakan semestinya para anggota DPR dapat Jakarta berdiskusi lebih dulu dengan DPRD DKI sebelum membuat kebijakan.

"Mereka tidak tahu masalah di Jakarta kayak gimana. Karena DPRD DKI lebih tau, diajak ngomong dong," jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diwajibkan mengalokasikan 5% APBD untuk operasional kelurahan di seluruh wilayah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menjelaskan, kewajiban mengalokasikan 5% APBD untuk kelurahan sudah diatur dalam Undang-Undang DKJ. "Untuk menjaga pemerataan pembangunan bagaimana, dan kami sepekat akhirnya minimal 5 persen dana APBD dapat disalurkan, wajib disalurkan sampai ke kelurahan," ujar Suhajar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9, Senin (22/4) lalu. • yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



POSKO ADUAN PENONAKTIFAN NIK DI JAKARTA

Lurah Petamburan Rian Hermanu (kedua kanan) didampingi Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kel. Petamburan Muhammad Fahri (kedua kiri) memberikan penjelasan kepada warga yang terdampak penertiban data kependudukan di Posko Aduan Penonaktifan NIK, Kel. Petamburan, Jakarta, Kamis (25/4). Posko aduan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang ingin melakukan penyanggahan terhadap data awalan NIK yang terkena dampak dari program penonaktifan terhadap 92 ribu NIK warga Jakarta.

Ketua DPRD Minta Heru Budi Evaluasi Penanganan Banjir dan Macet di Jakarta

Prasetyo mengatakan upaya penanggulangan banjir sudah memiliki anggarannya tersendiri, sehingga pengerukan saluran hingga kali dapat dilakukan secara berkala untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta selama menjabat.

"Misal soal banjir, turap dulu saja semua sungai. Kan saya pernah cerewet (soal banjir). Kalau di Jakarta dikatakan tidak banjir, bohong. Itu pasti banjir," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/4).

Prasetyo mengatakan upaya penanggulangan banjir sudah memiliki anggarannya tersendiri, sehingga pengeru-

kan saluran hingga kali dapat dilakukan secara berkala untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

"Siapa pun gubernur maupun penjabat gubernur kalau enggak sedikit radikal untuk masalah banjir, ya Jakarta tetap banjir," ucap Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo juga meminta Heru mengevaluasi terkait masalah kemacetan di Jakarta yang sampai saat ini masih sering terjadi. Menurut Prasetyo, Heru perlu mengambil tindakan tegas dalam menangani kemacetan di Jakarta.

"Kedua bicara masalah macet, istilahnya di penyangga Jakarta, itu juga kan harus

tegas. Kita sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau tidak tegas, ya pasti macet tidak akan hilang," ucap Prasetyo.

Masalah lain yang belum bisa diatasi oleh Heru, kata Prasetyo yakni soal tata ruang di Jakarta. Prasetyo menyebut masih ada lingkungan kumuh di Jakarta, bahkan lokasinya tidak jauh dari Istana Negara.

"Nah di tata ruang ini ada peraturan, misalkan, ada salah satu wilayah Kebon Jeruk peruntukannya harus hunian bukan buat komersial, tetapi di situ ada hotel. Artinya aturannya sudah ditabrak," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menerapkan enam inovasi pengendalian banjir yang di tempatkan pada lokasi-lokasi langganan banjir setiap kali hujan deras.

"Inovasi ini akan diimplementasikan dan diteruskan untuk meminimalkan dampak curah hujan yang tinggi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustina Ningrum saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/4).

Enam inovasi pengendalian banjir tersebut, antara lain pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti waduk atau embung, penguatan tanggul kali, pembangunan sistem polder atau pompa, penyiagaan dan pengecekan berkala rumah pompa, pintu air, hingga alat berat, meniadakan satuan tugas (satgas) di lapangan, dan peningkatan kapasitas drainase kawasan.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan upaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota dilakukan bersama dengan pihak terkait secara bertahap.

"Kami berkeinginan untuk menyelesaikan masalah kemacetan ini secara bertahap. Tidak bisa solusi itu selesai besok pagi, kemudian lalu lintas tidak macet. Itu tidak bisa," tegas Heru.

Heru menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) DKI dengan DPRD DKI terus bersinergi dan berusaha untuk sama-sama menyelesaikan masalah kemacetan di Ibu Kota, minimal mengurangi terlebih dahulu. • yan

Taman Jati Pinggir di Tanah Abang, Berubah jadi Lapak PKL

JAKARTA (IM) - Kondisi taman di Jati Pinggir Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat memprihatinkan. Pasalnya fasilitas taman banyak yang rusak dan berubah fungsi.

Taman yang terletak di pinggir Kali Banjir Kanal Barat dijadikan lapak jualan pedagang kaki lima. Sebagian kawasan ini juga dijadikan lapak penampungan barang bekas.

Ramli (39), salah satu warga mengaku kecewa dengan perubahan taman yang terkesan tidak terawat. Belum lagi kondisi permainan yang banyak berkarat dan bisa membahayakan anak-anak.

Salah satu permainan anak-anak ini saja bisa dililit, berkarat dan bolong. Sangat berbahaya sekali bagi anak-anak jika sedang bermain," ucap Ramli saat diwawancarai di taman Jati Pinggir, Tanah Abang, Kamis (25/4).

"Ini taman juga jadi tem-

pat parkir motor, lapak barang bekas, lapak pedagang hingga banyak kandang unggas," imbuhnya.

Amril (29) warga lainnya juga prihatin melihat kondisi taman Jati Pinggir yang semakin tidak terurus. Selain itu, taman juga dijadikan tempat penampungan barang rongsokan, kandang burung, parkir motor, dan lapak pedagang kali lima. "Miris banget melihat kondisi taman ini yang dulunya rapih tapi sekarang ambrukradul tidak terurus," keluhnya.

Sementara itu, salah satu petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang enggan disebutkan namanya mengatakan pihaknya kerap mendapati masalah saat membersihkan taman. "Kendala kami mulai dari banyak sampah, lapak barang bekas, parkir motor, lapak pedagang," ucap salah satu PJLP.

Petugas PJLP tersebut mengaku sangat kesal melihat tanaman yang sudah ditanam menjadi rusak akibat aktifitas tersebut. Dirinya juga pernah mengadakan ke Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat terkait kondisi taman. "Pernah melapor, terus dijaga satpol PP tapi itu hanya bertahan tiga hari saja. Setelah tidak dijaga langsung semraut lagi," ungkapnya.

Ia berharap agar taman Jati Pinggir bisa kembali ditata agar bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Belum lagi adanya posko - posko organisasi masyarakat (Ormas) yang berdiri di atas lahan taman.

Sebelumnya diberitakan, warga Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat keluhan kondisi taman Jati Pinggir yang berada di Banjir Kanal Barat (BKB) tidak terurus. Taman tersebut dinilai dapat membahayakan khususnya anak kecil saat sedang bermain. • yan

Kunjungi Jepang, Pj Heru Bahas Pembangunan TOD di Jakarta

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang. Kunjungan kerja itu bertujuan untuk membahas kerja sama di bidang transportasi, termasuk proyek MRT Jakarta.

Heru mengatakan, salah satu hal yang dibahas dalam kunjungan itu adalah pembangunan transit oriented development (TOD) di Jakarta. Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat mendukung pembangunan berkonsep TOD melalui kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang.

"Selama tanggal 24-25 April 2024, saya mendampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya, terkait dengan konsep pembangunan Jakarta ke depan. Antara lain adalah pembangunan TOD bersama para investor dari Jepang dan juga tentunya dari dalam negeri yang saat ini sedang berlangsung," kata Heru melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (25/4).

Heru mengatakan, kerja sama pembangunan dengan konsep TOD di Jakar-

ta sangat dapat diandalkan dalam pertumbuhan investasi pembangunan. Hal itu juga menandakan komitmen pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jepang untuk membangun Kota Jakarta yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

"Kerja sama tersebut diawali dengan pembangunan MRT yang didukung oleh Pemerintah Jepang. Saya ucapkan terima kasih kepada Duta Besar Jepang dan Menteri Perhubungan yang telah terus-menerus membangun Jakarta dengan konsep TOD dan untuk ke depannya," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) mengembangkan konsep multifungsi (mixed use) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hal itu menjadi bagian dari rencana pengembangan berorientasi transit atau TOD di lokasi tersebut.

"Sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita bangun mixed use yang di dalamnya ada kantor, hunian, dan sebagainya," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat saat konferensi pers Festival Hari MRT 2024 di Jakarta. • yan

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk					
Jl. H. Juanda No.1, RT 12 RW 03, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410					
Tel. (021) 2781.1932					
LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 dan 2022					
	31 Desember 2023	31 Desember 2022			
ASET					
Aset Lancar	10.962.300.859	14.573.810.962			
Kas dan setara kas	6.730.514.159	11.586.899.264			
Aset keuangan jangka lainnya	66.328.375.332	61.936.507.513			
Aset tidak lancar	1.014.000	-			
Utang muka	14.798.158.446	13.739.417.377			
Jumlah Aset Lancar	100.819.312.506	101.839.643.564			
Aset Tidak Lancar	-	-			
Tanah yang belum dikembangkan	3.602.233.092	3.602.233.092			
Properti investasi	12.261.867.633	8.973.933.838			
Aset tetap - setelah dikurangi	8.164.843.599	8.550.062.077			
Aset tak berwujud	341.216.041	579.717.625			
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.808.847.363	13.892.774.427			
Jumlah Aset	113.628.159.869	115.732.417.991			
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek	703.738.123	1.335.523.038			
Utang bank jangka pendek	14.650.000.000	14.090.000.000			
Utang lain-lain jangka pendek	63.726.745	93.927.107			
Utang pajak	430.265.791	819.798.886			
Pendapatan ditunda dikumulasi	3.439.319.847	4.314.837.450			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.277.048.506	20.468.092.480			
Liabilitas Jangka Panjang	-	-			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	14.441.900.000	14.983.100.000			
Utang pihak berelasi	195.345.291	195.345.291			
Liabilitas instrumen pasar uang	258.050.031	165.550.031			
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	14.895.300.322	15.343.040.309			
Jumlah Liabilitas	34.182.348.828	35.810.132.789			
EKUITAS					
Modal dasar - nilai nominal Rp40 per saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	1.750.000.000	1.750.000.000			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000.000	50.000.000.000			
Reservasi	12.227.000.000	12.227.000.000			
Saldo laba:					
Tanah akan dikembangkan	400.000.000	300.000.000			
Saldo laba:					
Tanah akan dikembangkan	400.000.000	300.000.000			
Saldo laba:					
Tanah akan dikembangkan	400.000.000	300.000.000			
Pendapatan komprehensif lainnya:					
Keuntungan/kerugian aktual	70.959.540	111.754.320			
Jumlah Ekuitas	79.590.309.133	79.618.280.184			
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	113.727.662.961	115.428.417.975			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022					
	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Pendapatan komprehensif lainnya	Total Ekuitas/Modal Saham	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2022	50.000.000.000	12.227.000.000	125.793.971	117.754.320	117.754.320
Saldo per 31 Desember 2022	50.000.000.000	12.227.000.000	111.754.320	300.000.000	16.978.025
Saldo per 1 Januari 2023	50.000.000.000	12.227.000.000	125.793.971	117.754.320	117.754.320
Saldo per 31 Desember 2023	50.000.000.000	12.227.000.000	70.959.540	400.000.000	16.978.025

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikonversikan Sebagai Setoran Saham, maka dengan ini kami umumkan bahwa PT SUKSES INKOR MARITIM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") akan mengkonversikan utang Perseroan kepada PT PASIFIK OCEAN SEJAHTERA sebesar Rp12.598.000.000,- (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) menjadi 12.598 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 April 2024
PT SUKSES INKOR MARITIM
Direksi